

## Eksistensi Subkultur *Blue Wall of Silence* dalam Permasalahan Integritas Polisi Indonesia

Laily Rahmah, Diany Ufieta Syafitri

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Sofia Retnowati, Bagus Riyono, Diana Setiyawati

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**Abstrak.** Subkultur *Blue Wall of Silence* (BWoS) merupakan larangan tidak tertulis untuk tidak melaporkan dan menutupi pelanggaran yang dilakukan rekan polisi. Hal ini diasumsikan sebagai salah satu faktor penyebab sikap defensif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tidak memberikan akses kepada penelitian akademis, inspeksi publik dan investigasi media untuk mendapatkan informasi aktual terkait perilaku tidak berintegritas (*misbehave*) yang dilakukan polisi. Studi eksplorasi kualitatif ini bertujuan menyelidiki eksistensi BWoS dalam praktek pemolisian Indonesia agar dapat dipahami faktor-faktor penyebab dan proses berkembangnya subkultur tersebut guna mengupayakan strategi untuk meminimalisir. Sebanyak 117 Staf Polisi yang berasal dari 13 satuan kerja yang berkantor di salah satu Kepolisian Daerah (Polda) di Pulau Jawa dilibatkan sebagai subjek penelitian. Data dari subjek diperoleh melalui kuesioner terbuka (*open-ended questionnaire*) dan diolah dengan menggunakan teknik analisis tematik dan analisis isi. Temuan studi menunjukkan bahwa BWoS juga ditemukan di Polri. Sikap diam sementara atas perilaku tidak berintegritas rekan polisi menjadi respon spesifik yang tidak ditemukan dalam penelitian terdahulu. Adapun faktor penyebab, proses dan dampaknya dalam proses pemolisian di Indonesia dipaparkan dalam diskusi dan ditampilkan dalam bentuk peta tematik dinamika eksistensi subkultur BWoS. Temuan ini dapat dijadikan referensi bagi pihak manajemen Polri untuk membuat kebijakan ataupun strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat meningkatkan integritas polisi.

**Kata Kunci:** *blue wall of silence*, *misbehave*, polisi, subkultur

## The Blue Wall of Silence Subculture Existence in Indonesian Police Integrity Issues

**Abstract.** The Blue Wall of Silence (BWoS) subculture is an unwritten prohibition against reporting and covering up violations by fellow police officers. This is assumed to be one of the factors causing the defensive attitude of the Indonesian National Police (Polri) which does not provide access to academic research, public inspections and media investigations to obtain actual information regarding misbehaved behavior by the police. This qualitative exploratory study is aimed at investigate the existence of BWoS in Indonesian policing practice in order to understand the causal factors and the development process of the subculture in order to seek strategies to minimize them. 117 Police staff from 13 work units based in one of the Regional Police (Polda) in Java were involved as research subjects. Data from the subjects were obtained through an open-ended questionnaire and processed using thematic analysis and content analysis techniques. The study findings show that BWoS exists in the National Police. A temporary silence on the behavior of a fellow police officer is a specific response that was not found in previous studies. The causes, processes and impacts in the policing process in Indonesia are presented in the discussion and presented in the form of a thematic map of the dynamics of the existence of BWoS subculture. This finding can be used as a reference for the police management to make policies or strategies for managing Human Resources (HR) that can improve police integrity.

**Keywords:** blue wall of silence, misbehave, police, sub-culture

**Korespondensi:** Laily Rahmah. Email: [laily.rahmah2@yahoo.com](mailto:laily.rahmah2@yahoo.com)

Permasalahan integritas dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga kini masih belum teratasi dengan tuntas. Integritas merupakan kebajikan (*virtue*) yang menimbulkan daya dorong untuk menggunakan partikular (kekuasaan yang terkait dengan kompetensi, sumber daya dan kemampuan individu maupun organisasi) demi kepentingan kebaikan bersama (Endro, 2017). Dengan demikian jika merujuk pada definisi tersebut, problem integritas Polri yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah permasalahan yang diakibatkan oleh perilaku institusi Polri baik secara personal maupun lembaga yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan melalui penggunaan kekuasaan/wewenang sebagai penegak hukum yang berdampak merugikan/mengancam atau membahayakan kepentingan bersama. Dalam studi perilaku organisasi hal ini dipandang sebagai bagian dari fenomena *the dark side of organization* yang lebih dikenal dengan istilah *Organizational Misbehaviour* (OMB).

Berbagai temuan dan laporan hasil riset dan survey dari beberapa LSM dan lembaga pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memaparkan manifestasi dari OMB yang dilakukan anggota Polri yang menjadi sorotan publik terutama tindak kekerasan dan tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuknya. Amnesty Internasional menemukan tindak kekerasan dalam bentuk penganiayaan oleh oknum Polisi terhadap pelaku kerusakan aksi 22 Mei 2019 yang telah tertangkap hingga

berakibat cacat tubuh dan kematian (Putra, 2019); Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menemukan 27 peristiwa penyiksaan sepanjang Januari-September 2017 yang mengakibatkan 43 orang tewas mayoritas pelaku adalah polisi (Oktaryal et al., 2018); sepanjang Juni 2018-Mei 2019 terdapat 643 kasus kekerasan yang dilakukan Polri mulai dari tingkat Polsek hingga Polda dengan beragam tindakan (seperti penembakan, penyiksaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang yang berakibat korban luka dan tewas (KontraS, 2019); keterlibatan petinggi Polri dalam tindak pidana korupsi seperti: Brigjen SI Komjen SL ; Jendral R ; Brigjen EI; Brigjen RE Irjen DS ; Brigjen DP dan serta pungutan liar seperti yang kerap dilakukan oknum polisi lalu lintas terkait perijinan yang dikenal dengan istilah “pritjigo”, “wereng coklat”, “jebakan polisi” dan sebagainya (Sudarto, 2015)

Secara universal, kasus OMB yang melibatkan polisi dalam berbagai manifestasinya sering tidak terselesaikan proses hukumnya. Salah satu penyebabnya diduga karena adanya mentalitas “*We Versus Them*” atau “*Us Versus Them*” yang berkembang di kepolisian yang beranggapan bahwa polisi berbeda dari publik dan publik musuh polisi. Untuk itu polisi tidak hanya harus menolong dirinya sendiri tetapi juga harus menolong sesama polisi untuk melawan publik. Mentalitas seperti ini mendorong tumbuh suburnya subkultur menjaga kerahasiaan di antara

sesama polisi (Vitale, 2017). Subkultur ini dikenal sebagai dinding keheningan (*blue wall of silence*) atau kode keheningan (*code of silence*) yang menurut (Kutnjak Ivkoviæ et al., 2020) merupakan aturan tidak tertulis tentang larangan untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan sesama polisi. Dalam tulisan ini sejak awal hingga akhir penulis akan menggunakan istilah *Blue Wall of Silence* (BWoS).

BWoS dilandasi rasa kesetiakawanan sehingga polisi tidak akan bersaksi satu sama lain untuk menjaga hubungan persaudaraan dan pertemanan di antara sesama polisi yang dianggap sangat penting (Kleinig, 2001) Rasa solidaritas di antara sesama polisi bisa dipahami dari konsep psikologis yakni perspektif kelekatan. Hubungan kelekatan berpotensi untuk muncul dalam interaksi antar individu, saat satu individu menawarkan dukungan dan perlindungan kepada individu lain (Hinde, 1979). Selama bertahun-tahun sejak dari bayi hingga dewasa individu secara bertahap akan membangun harapan tentang kelekatan berdasarkan pengalaman yang terjadi dalam hidupnya (Bowlby, 1969). Respon dari figur kelekatan terhadap keinginan dan kebutuhan individu yakni rasa aman & perlindungan akan dimasukkan ke dalam representasi mental diri, dan orang lain yang akan memandu persepsi dan perilaku individu di kemudian hari (Feeney, 1999). Adapun terjadinya hubungan kelekatan tidak hanya didasarkan pada prinsip biologis tetapi juga dipengaruhi pengalaman sosial (Kobak, 1999).

Polisi saat diterima pertama kalinya dan bergabung dengan institusi kepolisian akan mendapatkan pendidikan dasar (diksar) selama kurun waktu tertentu. Dalam masa diksar itu berbagai gembengan fisik dan mental membuat para polisi baru itu berada dalam situasi yang penuh tekanan dan penderitaan. Dalam situasi seperti itu para polisi baru itu sangat membutuhkan figur kelekatan yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman. Adapun yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan tersebut oleh para polisi baru itu adalah individu lain yang ada dan terdekat secara fisik dengan para polisi baru itu, tidak lain adalah rekan polisi lain yang saat itu juga merasakan tekanan dan penderitaan yang sama. Rasa senasib sepenanggungan memunculkan hubungan kelekatan yang pada akhirnya melandasi tumbuhnya rasa solidaritas diantara sesama polisi. Hubungan kelekatan yang telah tercipta ini makin diperkuat saat polisi sudah mulai bekerja. Pekerjaan polisi yang umumnya berisiko tinggi membuat polisi sering berada dalam situasi bahaya yang sangat membutuhkan keamanan dan perlindungan dari rekan polisi lain. Hal ini berlangsung secara berkelanjutan hingga makin memperkuat hubungan kelekatan yang melandasi rasa solidaritas yang sejak awal sudah terbentuk diantara sesama polisi

Hubungan kelekatan bersifat asimetris (Bowlby, 1969) terjadi antara yang lebih kuat atau lebih bijaksana dengan yang lebih lemah dan individu yang lemah akan bergantung pada individu lain. Jadi arah hubungan kelekatan

yakni dari yang lemah ke yang lebih kuat (Hill et al, 2003). Selama bertahun-tahun hubungan kelekatan bisa saling menguntungkan dan juga bisa berubah arah. Dalam arti yang tadinya menjadi figur kelekatan bisa menjadi individu yang membutuhkan pertolongan. Arah hubungan kelekatan yang seperti ini juga dapat menjelaskan solidaritas yang terbentuk diantara sesama polisi. Polisi melekatkan dirinya pada rekan polisi lain meski posisinya sama namun dalam hal ini rekan polisi lain dianggap memiliki kekuatan yang dapat digunakan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan polisi yang membutuhkan. Sebagai contoh saat masih dalam diksar jika satu polisi berbuat kesalahan maka rekan polisi lain akan rela mengakui kesalahan tersebut sebagai kesalahan bersama sehingga polisi yang melakukan kesalahan hukumannya terasa lebih ringan karena ditanggung bersama. Namun arah hubungan kelekatan ini juga bisa terjadi antara polisi junior yang melekatkan diri dengan seniornya atau pimpinannya begitu pula sebaliknya. Sejak awal polisi junior memang di doktrin harus tunduk pada polisi senior atau pimpinan. Sementara itu telah berkembang budaya di institusi kepolisian bahwa jika seorang polisi mampu melindungi ataupun mendukung senior atau pimpinannya maka polisi tersebut juga akan didukung dan dilindungi pada saat membutuhkan pertolongan.

Rasa solidaritas yang didasari hubungan kelekatan di antara sesama polisi ini mendukung BWoS yang mendorong kemunculan sikap

defensif institusi kepolisian untuk mencegah investigasi media, penelitian akademis dan inspeksi publik untuk mendapatkan akses informasi terkait pelanggaran yang dilakukan kepolisian dan personilnya (Vitale, 2017). Meskipun dilandasi nilai-nilai kebajikan dan kesetiaan dalam konteks persahabatan dan pertemanan, yakni untuk melindungi teman (sesama polisi) namun upaya perlindungan ini dilakukan dengan mengorbankan orang lain (warga sipil) dan tindakan-tindakan kemanusiaan yang seharusnya dilakukan polisi sesuai dengan peran tugasnya sebagai *law enforcement and public servant* (Marshall, 2019).

BWoS diyakini merupakan subkultur polisi yang tidak terbantahkan dan sifatnya universal (Wood, 1997). Sejumlah besar literatur mengungkapkan temuan yang konsisten terkait hal tersebut. Sebuah komisi independen yang bertugas menyelidiki tindak pidana korupsi dan prosedur anti korupsi di departemen kepolisian di New York menyebutkan bahwa BWoS sudah sangat mengakar kuat di departemen kepolisian New York dan hal tersebut sangat mempengaruhi sebagian besar polisi yang jujur maupun korup. Sebuah studi melaporkan sekitar dua pertiga dari polisi tidak selalu melaporkan kesalahan serius yang dilakukan rekan polisinya (Weisburd; et al, 2000). Hal ini membuat OMB polisi terus berlanjut dan sulit dikendalikan. Ada tekanan dalam subkultur polisi untuk mematuhi BWoS, jika tidak, pelapor akan dikucilkan,

dilecehkan, dan diancam secara fisik. Konsekuensi negatif ini membuat polisi tidak hanya menjadi enggan melaporkan OMB yang dilakukan polisi lain tetapi juga bersedia untuk bertanggung jawab atas kesalahan polisi lain.

Para ilmuwan melalui temuan studinya menemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi BWoS. Long et al. (2013) menemukan bahwa, semakin besar dukungan pelaporan pelanggaran semakin besar kemungkinan responden untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan polisi lain ataupun pelanggaran yang dilakukan diri sendiri. Selain itu, Kleinig (2001) menemukan faktor lain yang mempengaruhi BWoS, yakni: (1) Kesetiaan yang mendalam terhadap hubungan yang terjalin di antara sesama petugas polisi; (2) Biaya melanggar BWoS yang mahal seperti biaya sosial (dikucilkan, dilecehkan, dicemarkan nama baiknya), biaya karir (dipindah tugaskan ke tempat yang tidak diinginkan, dievaluasi secara buruk, tidak dipromosikan), biaya fisik atau psikologis (menurunnya kesehatan fisik karena stress yang berkepanjangan); (3) Hubungan timbal balik, yakni pertimbangan bahwa jika ada salah satu dari anggota kepolisian yang berada dalam bahaya, benar atau salah, layak dibantu. Hal ini diyakini suatu hari akan berbalik ke diri polisi yang telah membantu; (4) Perasaan bahwa secara moral BWoS tidak boleh ditembus.

Pengungkapan fakta tentang BWOS secara empirik melalui studi-studi ilmiah tentu saja membutuhkan instrumen atau alat ukur

yang kredibel yang benar-benar dapat dipercaya untuk mengungkap fenomena BWOS. Adapun perspektif teori yang digunakan sebagai landasan untuk memahami fenomena BWOS maupun untuk membuat instrument yang mengungkap hal tersebut antara lain teori integritas dan teori iklim etis.

### **Teori Integritas**

Teori integritas polisi merupakan salah satu teori yang digunakan para ahli untuk menjelaskan fenomena BWoS. Simposium Nasional Juli 1996 tentang Integritas Polisi di Amerika Serikat menjadi titik awal dari beberapa penelitian besar tentang integritas polisi termasuk tes skala besar pertama dari apa yang kemudian dikenal sebagai survei integritas (Greene et al., 2004). Klockars dan Ivkoviæ (2004) merancang teori integritas polisi dan survei integritas untuk memperbaiki masalah yang dialami dalam studi sebelumnya yang mengajukan pertanyaan langsung tentang OMB polisi dan keterlibatan responden dalam OMB tersebut. Survei ini mengukur integritas melalui sikap, persepsi, dan laporan petugas polisi tentang cara polisi saat merespons situasi hipotetis yang menggambarkan tantangan integritas. Instrumen integritas untuk selanjutnya banyak diadaptasi oleh para ilmuwan di seluruh dunia.

Teori tentang integritas polisi diciptakan oleh Klockars dan Kutnjak-Ivkovic berdasarkan karya awal Herman Goldstein (Meyer et al., 2013). Teori ini mengemukakan empat dimensi

organisasi dan pekerjaan: (1) aturan organisasi; (2) mekanisme pencegahan dan kontrol; (3) kode; dan, (4) harapan publik. Dimensi pertama, aturan organisasi, berkaitan dengan bagaimana aturan yang mengatur korupsi dibuat, dikomunikasikan, dan dipahami. Dimensi kedua, mekanisme pencegahan dan kontrol membahas berbagai teknik, mekanisme, yang ada di dalam organisasi, untuk mencegah dan mengendalikan korupsi. Dimensi ketiga, kode membahas sejauh mana BWoS beroperasi di dalam organisasi yang secara informal melarang atau mencegah petugas melaporkan kesalahan polisi lain. Dimensi keempat, harapan publik mengatasi pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan/atau politik eksternal suatu departemen karena hal itu memengaruhi penerimaan atau penolakan korupsi oleh suatu komunitas. Klockars dan rekannya (Klockars et al, 2006; Klockars et al, 2004) mengembangkan survei integritas sebagai bagian dari teori integritas polisi yang memasukkan BWoS sebagai dimensi kunci dari teori tersebut. Sejatinnya survey integritas ini secara implisit mengukur BWoS melalui pertanyaan tentang kesediaan responden untuk melaporkan berbagai pelanggaran polisi. Dengan demikian untuk menganalisa temuan data empirik terkait BWoS yang diperoleh dari responden dapat digunakan teori integritas yang digagas oleh Klockars et al (2004).

### **Teori Iklim Etis**

Teori iklim etis juga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena BWoS yang

berkembang di institusi kepolisian. Menurut Cullen dan Bronson (1993), iklim etis adalah dimensi etis budaya organisasi yang dipandang anggota sebagai norma etika dan identitas organisasi. Iklim etis yang berkembang di institusi kepolisian dijadikan pendekatan etis (kriteria, alasan, atau standar yang digunakan seseorang saat mengambil keputusan etis) oleh polisi. Iklim persahabatan atau iklim tim di kepolisian menjadi pedoman orientasi yang melandasi perilaku etis maupun tidak etis sehingga dapat berperan sebagai prediktor dari kesediaan polisi untuk melaporkan atau tidak melaporkan OMB polisi lainnya. Dengan demikian dapat dipahami alasan polisi berkolusi untuk saling melindungi satu sama lainnya melalui BWoS.

Sebagian besar literatur menegaskan BWoS lebih kuat mengakar di iklim polisi daripada sipil. Bekerja dalam misi yang berbahaya menyebabkan polisi membutuhkan solidaritas dan perlindungan diri (Kingshott et al, 2004; Paoline, 2003; Skolnick, 2002). BWoS adalah instrumen untuk kohesi internal yang menyediakan solidaritas dan perlindungan yang dibutuhkan polisi (Kappeler, 1999; Manning, 1997). Kebutuhan polisi akan solidaritas dan perlindungan didukung oleh ketidakpastian situasional dalam bekerja yang terkadang dihadapkan pada kekerasan dan kekuatan yang mematikan (Crank, 1998; Skolnick, 2002). Dalam kondisi demikian polisi dituntut untuk segera bertindak dan BWoS dibutuhkan untuk melindungi diri jika dalam kondisi tersebut

polisi terlanjur mengambil tindakan yang salah hingga hal tersebut tidak akan terungkap (Skolnick, 2000). Menurut Crank (1998) BWoS dapat melindungi polisi dari pengawasan dan warga masyarakat yang tidak akan mengerti situasi bahaya yang dihadapi polisi saat memutuskan untuk menggunakan kekerasan terhadap para kriminal.

Studi komparatif tentang BWoS yang dilakukan Klockars dan kolega menganalisis BWoS di 12 negara, dan menemukan perbedaan yang signifikan antar negara. Hasil studi menunjukkan bahwa di Kroasia, Hongaria, Pakistan, Polandia, dan Afrika Selatan, BWoS nya sangat kuat sehingga sebagian besar polisi benar-benar tidak beredia melaporkan pelanggaran yang dijelaskan dalam skenario (Klockars et al, 2007). Penelitian komparatif yang lebih baru dilakukan di 10 negara (Armenia, Australia, Kroasia, Estonia, Rusia, Slovenia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, AS) (Ivkoviæ & Haberfeld, 2015). Temuannya adalah BWoS di Armenia, Kroasia dan Thailand tampaknya agak lebih kuat daripada BWoS di Australia, Estonia, Slovenia, Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Hasilnya juga menyiratkan bahwa BWoS agak kuat di kategori negara Korea Selatan. Namun demikian di antara 10 negara tersebut yang terkuat BWoS nya adalah Rusia.

Temuan studi tentang perbedaan kontur BWoS yang signifikan antar negara tersebut telah dijelaskan dalam studi yang lebih awal yang digagas oleh Ivkoviæ dan Shelley (2008),

bahwa ekstensivitas BWoS akan berbeda antar negara yang sedang bertransisi menuju bentuk pemolisian demokratis dan negara yang sudah stabil menjalankan praktek pemolisian demokratis. Pada negara yang berada dalam transisi menuju praktek pemolisian demokratis personilnya juga baru belajar bertransisi integritasnya dari polisi yang bergaya militan yang terbiasa melayani penguasa atau pejabat tinggi pemerintah menjadi polisi yang demokratis yang harus melayani masyarakat. Dalam hal ini polisi di negara transisi tidak lagi diwajibkan patuh pada penguasa tetapi harus patuh pada hukum. Tentu saja ini tidak mudah karena polisi terbiasa melindungi penguasa termasuk perilaku buruk penguasa sehingga diasumsikan polisi terbiasa melakukan BWoS dalam hal ini polisi menutupi OMB penguasa namun sejatinya kemungkinan ada petinggi polisi yang memerintahkan hal tersebut. Dengan demikian polisi secara tidak langsung juga melakukan BWoS karena esensinya juga melindungi sesama polisi.

Institusi kepolisian di Indonesia sejatinya juga masih dalam masa transisi menuju pemolisian yang demokratik sejak berpisah dari ABRI di tahun 1999. Meski sudah dua dasa warsa menjalani proses transisi dan juga sudah berreformasi namun hingga kini reformasi kultural belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini terrefleksikan dari perilaku anggota Polri masih banyak yang tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Laporan dari temuan-temuan lembaga-lembaga

pemerhati HAM dan Integritas seperti KontraS, *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Amnesty International, ELSAM, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) dan masih banyak lagi hampir setiap tahunnya mengemukakan fakta-fakta tentang perilaku buruk polisi yang mayoritas terkait pelanggaran HAM (berbagai bentuk tindak kekerasan) dan yang terkait tipikor. Di antara sejumlah kasus yang dilaporkan tidak sedikit yang proses hukumnya terbengkalai. Fenomena ini memunculkan asumsi publik bahwa hal ini sebagai dampak dari sifat defensif Polri yang berakar dari subkultur BWoS yang kemungkinan juga berkembang di Polri.

Adapun fakta yang mengarahkan asumsi bahwa eksistensi subkultur BWoS ini juga diadopsi di Polri. Salah satunya adalah kegagalan Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2018 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur indeks integritas Polri akibat minimnya kesediaan responden yang bisa dijadikan sampel pengukuran. Tahun sebelumnya 2017 agenda SPI juga mengalami kesulitan meski masih tetap dapat diukur indeksnya. Tidak akomodatif dan sikap resisten Polri terhadap SPI seperti merefleksikan sikap defensif terhadap transparansi yang diinginkan publik dan tampaknya hal ini merupakan dampak dari subkultur BWoS (Taher, 2019). Fakta-fakta lain tentang ekistensi BWoS di Polri adalah terbongkarnya kasus pidana yang melibatkan NB (salah satu penyidik senior KPK)

di masa silam dan kasus tipikor yang melibatkan Komjen SD (mantan kabareskrim) juga di masa silam jika memang hal ini bukan kasus yang direkayasa. Terbongkarnya kasus OMB masa silam dari dua mantan personil Polri di masa kini tersebut seperti mengarahkan pada asumsi adanya subkultur BWoS. Adapun konsekuensi negatif yang diterima paska terbongkarnya kasus OMB keduanya, membuktikan mahal biaya yang harus dibayar polisi sebagai akibat dari keberanian menentang BWoS. Sebagaimana diketahui NB telah berani membongkar kasus tipikor proyek simulator SIM yang melibatkan salah satu petinggi Polri sedangkan Komjen SD telah membongkar kasus mafia pajak yang juga melibatkan petinggi Polri (Hiariej, 2017; Muttaqin & Susanto, 2018).

BWos ini berlaku dalam berbagai jenjang tingkat kepangkatan, baik antar sesama, antara senior dan junior, maupun antar bawahan dan atasan. Hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang terpola dan berlangsung tetap “*ajeg*” atau terus menerus, sehingga menjadi virus akut yang terus tumbuh subur menyebar ke seluruh sistem Polri. Kondisi Polri yang demikian sudah tentu akan memunculkan konsekuensi negatif yakni: terjadi ketidakefisienan (*inefficient*), ketidakefektifan (*ineffective*) ketidakpercayaan publik (*public untrusted*), ketidakterandalan (*unreliable*) dan pada akhirnya menjadi beban bagi *stakeholder*-nya, yaitu masyarakat dan negara (Sudarto, 2015).

Berdasarkan dampak negatif yang ditimbulkan maka studi eksplorasi kualitatif ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan bukti empirik dan pemahaman terkait eksistensi dan konsepsi subkultur BWoS dari perspektif polisi Indonesia. Studi-studi terdahulu terkait subkultur BWoS ini telah banyak dilakukan dalam konteks pemolisian di negara-negara Barat bahkan sejak tahun 1970-an. Adapun studi BWoS dalam konteks pemolisian di negara-negara Timur khususnya di Indonesia sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Dengan demikian temuan studi ini diharapkan dapat menyempurnakan konsep tentang subkultur BWoS yang berkembang dalam konteks masyarakat di negara timur. Selain itu temuan studi ini juga diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor pembentuk dan proses pengembangan BWoS di Polri agar dapat diupayakan strategi untuk memutus atau meminimalisir pengembangan subkultur yang menyimpang tersebut.

## Metode

### Subjek penelitian

Penelitian dilakukan di salah satu kepolisian daerah (Polda) di Indonesia yang ada di Pulau Jawa. Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 117 polisi yang mewakili 13 unit atau satuan kerja yang berkantor di salah satu Polda yang ada di Pulau Jawa tersebut. Tiap-tiap unit diambil sembilan polisi. Jumlah tersebut didasarkan pada pertimbangan praktis

bukan pertimbangan metodologis karena yang diijinkan pihak Polda setempat untuk dijadikan subjek penelitian sejumlah tersebut. Selain itu jumlah tersebut yang rata-rata sedang bertugas di tiap tiap satuan kerja yang bisa ditemukan peneliti saat pengambilan data dilakukan. Sebagian besar yang lain sedang bertugas di lapangan

### Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan kuesioner pertanyaan terbuka (*open-ended questionnaire*) sebagai instrumen untuk penggalan data. Kuesioner pertanyaan terbuka disusun penulis untuk mengeksplorasi eksistensi BWoS dalam praktek pemolisian di Indonesia. Kuesioner terbuka terdiri dari 12 pertanyaan yang mengungkap berbagai hal seperti: opini tentang perilaku polisi yang mendukung BWOS, respon terhadap rekan polisi yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, nilai-nilai organisasi yang mendukung BWOS, waktu dan cara-cara organisasi menginternalisasi nilai-nilai yang mendukung BWOS, faktor-faktor pendukung BWOS, konsekuensi positif dan negatif dari sikap diam dan melaporkan kesalahan atau pelanggaran rekan polisi serta opini tentang konsekuensi negatif dari polisi yang menentang BWOS pada kasus yang terjadi di Indonesia. Namun setelah dilakukan uji coba, 1 pertanyaan digugurkan karena melalui wawancara dengan responden uji coba pertanyaan tersebut sulit

dimaknai maksudnya. Dengan demikian kuesioner yang diberikan kepada peserta hanya berisi 11 pertanyaan. Uji coba dilakukan kepada 13 polisi yang berasal dari 13 unit atau satuan kerja yang ada di Polda yang menjadi tempat penelitian. Masing-masing unit kerja diambil satu orang polisi. Dengan demikian responden uji coba pada riset ini cukup *representative* karena mewakili seluruh responden yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini.

### **Teknik analisis data**

Adapun metode analisis yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari proses analisis data teks dengan menggunakan metode kategorisasi analisis konten yang ditawarkan oleh Weber (1990) dan analisis tematik yang ditawarkan oleh Braun dan Clarke (2006). Analisis konten digunakan untuk menemukan trend dalam data agar dapat diketahui konsep yang dominan sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema dalam data sehingga dapat dipahami fenomena psikologis secara lebih mendalam tentang eksistensi BWoS dalam praktek pemolisian di Indonesia.

### **Hasil**

Kecenderungan untuk diam atau tidak melaporkan masih menjadi salah satu respon yang dipilih polisi saat mengetahui atau

menyaksikan perilaku buruk atau kesalahan ataupun kejahatan (OMB) rekan polisi lain, meski bukan menjadi pilihan mayoritas. Hal ini diperoleh dari butir yang mengungkap respon terhadap perilaku rekan polisi yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Dalam penelitian ini ditemukan tiga variasi respon, yakni: melaporkan (63.87%), diam sementara (tidak melaporkan untuk sementara waktu) (24.37%), dan bersikap diam (11.76%) (Tabel 1). Tindakan melapor bisa ditujukan secara langsung kepada divisi pengawasan internal yang ada di Polda atau secara berjenjang dimulai dari melapor kepada supervisor dari pelaku OMB yang nantinya akan diteruskan secara bertahap kepada pimpinan yang lebih tinggi hingga berakhir di divisi pengawasan internal. Adapun respon diam sementara merupakan upaya melakukan investigasi lebih mendalam untuk mencari bukti-bukti yang kuat atas OMB yang dilakukan rekan polisi dan untuk memberikan nasehat sebelum sampai pada tindakan melaporkan. Namun respon diam sementara ini memungkinkan untuk berubah menjadi respon melaporkan jika rekan polisi pelaku OMB tersebut setelah melalui proses investigasi terbukti bersalah dan tidak mengindahkan nasehat dan kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki perilaku buruknya.

**Tabel 1***Respon Terhadap OMB Rekan Polisi*

Jenis Respon	%
Melaporkan	63.87
Tidak Melaporkan Sementara	24.37
Tidak Melaporkan (Diam)	11.76

*Catatan. N = 119*

Setiap respon yang dipilih polisi tentu didasari oleh alasan dan pertimbangan tertentu. Perasaan takut (71.05%) menjadi alasan utama polisi untuk memilih bersikap diam saat mengetahui OMB rekan polisi lain. Data kuesioner menunjukkan perasaan takut yang dimaksudkan adalah perasaan takut akan terlibat masalah yang jauh lebih besar sebagai konsekuensi apabila melaporkan. Motif untuk menyadarkan rekan pelaku OMB (27.63%) dan tidak memiliki waktu dan perhatian (1.32%) karena disibukkan peran tugas utama sebagai polisi menjadi alasan lainnya dari sikap diam polisi. Motif menyadarkan rekan polisi pelaku OMB dilandasi oleh rasa solidaritas sesama rekan untuk tidak saling menjatuhkan sehingga rekan yang dianggap salah jalan dapat kembali berintegritas (memberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik) Tabel 2.

Adapun alasan yang membuat sebagian besar partisipan memilih respon untuk melaporkan OMB rekan polisi lain, berdasarkan Tabel 3 ada empat hal, yakni: (1) pemaknaan

esensi sejati loyalitas terhadap rekan (60.55%); (2) komitmen institusi (17.43%); (3) pencegahan OMB (14.68%) dan (4) pencegahan reputasi buruk institusi (7.34%). Esensi sejati loyalitas terhadap rekan sejatinya tidak seharusnya diwujudkan dalam bentuk menutupi OMB rekan, namun harus diarahkan pada kebersamaan melakukan hal-hal yang positif terutama dalam mendukung pelaksanaan peran tugas polisi sebagai penegak hukum. Selain itu, partisipan juga beranggapan tidak ada alasan untuk tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan institusi Polri untuk menegakkan integritas berupa sistem yang memudahkan anggotanya untuk melakukan pelaporan saat menyaksikan OMB rekan polisi lain. Data kuesioner juga menunjukkan bahwa dengan melaporkan OMB rekan polisi sama halnya dengan melakukan pencegahan awal berkembangnya OMB yang lebih parah, berskala besar dan lebih merugikan. Dengan demikian secara otomatis reputasi institusi Polri juga bisa terjaga.

**Tabel 2***Alasan Bersikap Diam*

Alasan	%
Perasaan Takut	63.87
Motif Menyadarkan Pelaku OMB	24.37
Disibukkan Tugas Utama	11.76

*Catatan. N = 76***Tabel 3***Alasan Melaporkan*

Alasan	%
Esensi sejati loyalitas terhadap rekan	60.55
Komitmen institusi	17.43
Pencegahan dini OMB	14.68
Pencegahan reputasi buruk Institusi	7.34

*Catatan. N = 109*

Sejak awal polisi sudah menyadari, bahwa apapun respon yang dipilih saat menyaksikan OMB rekan polisi lain akan memberikan konsekuensi tertentu. Adapun

konsekuensi negatif yang berpotensi diterima polisi yang melaporkan atau bersikap diam atas OMB rekan polisi lain dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.

**Tabel 4***Konsekuensi Negatif Melaporkan*

Bentuk Konsekuensi	%
Masa depan karir terancam	40.30
Sanksi sosial (dari rekan)	37.31
Keselamatan diri terancam	22.39

*Catatan. N = 67***Tabel 5***Konsekuensi Negatif Tidak Melaporkan (Bersikap Diam)*

Bentuk Konsekuensi	%
Sanksi Hukum	35.63
Kinerja Institusi Menurun	31.87
OMB polisi makin menyebar	17.50
Sanksi psikologis	13.13
Hukum gagal ditegakkan	1.87

*Catatan. N = 160*

Perihal yang paling ditakuti oleh polisi dan memunculkan keengganan untuk melaporkan OMB rekan polisi lain adalah terancamnya masa depan karir (40.30%). Temuan dari data kuesioner menunjukkan bahwa polisi yang melakukan pelaporan berpotensi untuk dimutasi ke tempat-tempat yang tidak diinginkan yang tidak memungkinkan karir polisi berkembang, dicopot dari jabatannya saat itu atau bahkan yang paling menakutkan juga berpotensi untuk dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perihal buruk lainnya yang berpotensi untuk diterima pelapor adalah mendapatkan sanksi sosial dari rekan (37.31%) berupa pengucilan dari pergaulan, intimidasi, dan pencemaran nama baik. Selain itu, keselamatan diri pelapor juga tidak luput dari ancaman (22.39%) mulai dari mendapat siksaan atau hukuman fisik dari rekan, kelompok, ataupun pihak-pihak tertentu hingga teror yang berakibat kematian.

Adapun akibat buruk dari sikap diam polisi atas OMB rekan polisi lain yakni akan: (1) mendapat sanksi hukum (35.63%) karena dianggap menutupi kejahatan; (2) kualitas kinerja institusi akan menurun (31.87%) karena sebagai institusi penegak hukum sudah membiarkan anggotanya melanggar hukum; (3) OMB polisi akan makin tumbuh subur dan meluas karena sejak awal pelakunya tidak ditindak tegas dan cenderung dilindungi (17.50%), dan (4) beban psikologis berupa rasa bersalah karena

telah menutupi OMB dan juga penerapan hukum yang adil mengalami kegagalan (1.87%).

Temuan penelitian berikutnya terkait masa dan cara internalisasi nilai-nilai yang mendorong polisi bersikap diam atau tidak melaporkan OMB rekan polisi lain. Sejak dari masa pendidikan, pelatihan dan hingga saat telah bekerja (Tabel 6) polisi dikenalkan, dipahamkan serta ditanamkan nilai-nilai kebersamaan diantara sesama polisi untuk mendukung keberhasilan dalam menjalankan peran tugas polisi yang tidak dapat dikatakan ringan. Nilai-nilai ini dipahami, dimaknai dan diwujudkan dalam bentuk loyalitas yang kuat terhadap rekan. Faktanya loyalitas terhadap rekan ini tidak saja diterapkan untuk hal yang positif namun juga negatif. Loyalitas terhadap teman yang dilandasi pemaknaan bahwa kesalahan satu orang (polisi) merupakan kesalahan bersama terimplikasi dalam sikap diam polisi saat menyaksikan OMB rekan polisi lain. Sikap ini mengakar kuat pada setiap diri polisi dan selanjutnya berkembang menjadi subkultur yang dikenal sebagai BWoS atau dinding biru keheningan. Adapun cara institusi Polri menginternalisasi BWoS paling banyak dilakukan melalui sosialisasi dalam berbagai agenda kerja (30.77%), pemberian doktrin/ajaran tentang kebersamaan (27.69%), pengarahan pimpinan ataupun senior (21.54%), serta pengajaran (di masa pendidikan) (20%) (Tabel 7).

**Tabel 6***Masa Internalisasi Nilai-nilai Subkultur BWoS*

Masa	%
Pendidikan, Pelatihan dan Pengajaran	52.05
Pendidikan dan Bekerja	17.81
Pendidikan	15.07
Bekerja	15.07

*Catatan. N = 73***Tabel 7***Cara Internalisasi Nilai-nilai Subkultur BWoS*

Cara	%
Sosialisasi	30.77
Doktrin	27.69
Pengarahan	21.54
Pengajaran	20.00

*Catatan. N = 65*

Masih ditemukannya respon tidak melaporkan (bersikap diam) atas OMB rekan polisi lain dalam penelitian ini mengindikasikan masih adanya subkultur BWoS di institusi Polri yang menjadi tempat penelitian. Masih eksisnya subkultur BWoS ini tentu dipicu adanya berbagai faktor. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa loyalitas terhadap sesama rekan polisi menjadi faktor terbesar yang mendorong polisi bersikap diam atas OMB rekan polisi lain (14.58 %). Loyalitas terhadap rekan yang dimaksud disini adalah dorongan

pribadi yang dilandasi rasa persaudaraan dan kesetiakawanan yang kuat serta rasa senasib seperjuangan terhadap sesama polisi untuk tidak saling menjatuhkan dan tidak membiarkan polisi lain terlibat dalam masalah. Dua faktor lain yang juga memberikan pengaruh cukup besar terhadap sikap diam polisi adalah rasa takut terlibat masalah (14.29%) dan upaya mempertahankan citra baik institusi (8.79%). Adapun faktor-faktor lain yang turut berpengaruh meski relatif kecil dapat secara detail dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8***Faktor-faktor Pendukung Subkultur BWoS*

Faktor	%
<b>Internal</b>	
Loyalitas Terhadap Rekan	23.08
Penghindaran Masalah	14.28
Upaya mempertahankan Citra Institusi	8.79
Pelepasan tanggung jawab	7.69
Keengganan intervensi urusan orang lain	6.59
Hutang Budi dengan pelaku OMB	6.59
Pemberian Kesempatan (pelaku OMB) Berubah	5.49
Kedekatan emosi dengan pelaku OMB	2.20
Berpengalaman sebagai pelaku OMB	2.20
Keterlibatan dalam OMB	1.10
Pencegahan dendam (dari pelaku OMB)	1.10
Berkerabat dengan pelaku OMB	1.10
Pelaku OMB terkategori pemula	1.10
<b>Eksternal</b>	
Tekanan Kelompok	4.40
Ketersediaan bukti OMB yang minim	4.40
Kesibukan Kerja (Peran Tugas Utama Polisi)	3.29
OMB Terkategori ringan	2.20
Kesamaan almamater dengan pelaku OMB	2.20
Efek Suap	1.10
Kegagalan agenda reformasi birokrasi Polri	1.10

*Catatan. N = 91*

Secara umum penelitian ini memang menemukan bukti terkait mulai tumbuhnya kesadaran polisi Indonesia untuk menegakkan integritas di atas loyalitas terhadap rekan dilihat dari pilihan yang ditunjukkan mayoritas polisi untuk melaporkan OMB rekan (63.87%). Namun demikian penelitian ini juga masih menemukan keengganan polisi untuk melaporkan OMB rekan polisi lain. Sebanyak 36.13%, baik yang bersikap diam untuk sementara waktu maupun yang secara tegas memutuskan untuk tidak akan melaporkan. Hal ini menunjukkan masih eksisnya subkultur BWoS dalam praktek pemolisian di Indonesia. Temuan terkait alasan partisipan bersikap

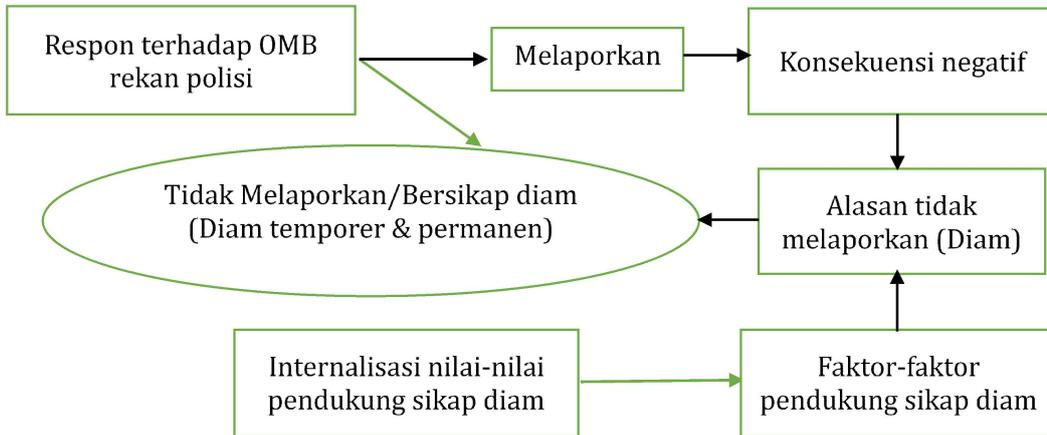
diam dan penjelasan tentang konsekuensi negatif dari melaporkan OMB rekan polisi lain mendasari masih eksisnya BWoS di Polri. Bayangan menakutkan jika mengalami konsekuensi buruk terkait masa depan karir, keselamatan diri dan sanksi sosial yang tidak menyenangkan dari *peer* (rekan polisi) menjadi perih yang secara dominan mempengaruhi pilihan polisi untuk bersikap diam. Kesadaran untuk tidak menjatuhkan dan tidak membiarkan rekan terlibat masalah mendorong keinginan untuk memberi kesempatan rekan memperbaiki perilaku buruknya juga mendasari sikap diam. Perihal lain yang juga turut mempengaruhi pilihan

bersikap diam adalah kesibukan menjalankan peran tugas polisi yang sedemikian menyita

waktu hingga mengurangi dorongan untuk mengurus OMB rekan polisi lain.

**Gambar 1**

*Peta Tematik Dinamika Eksistensi Subkultur BWoS*



Sikap diam atas OMB rekan polisi lain yang merupakan produk dari nilai-nilai subkultur BWoS yang berkembang di institusi kepolisian, tentu tidak muncul begitu saja dalam diri polisi. Terdapat berbagai perihal yang berkontribusi antara lain cara dan masa internalisasi nilai-nilai BWoS dan faktor-faktor pendukung subkultur BWoS. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa institusi kepolisian secara intensif, menanamkan nilai-nilai yang berpotensi memunculkan sikap diam dalam tahapan yang berkesinambungan sejak dari masa pendidikan, terutama saat pendidikan dasar, masa pelatihan hingga dalam masa bekerja. Adapun cara yang digunakan untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai tersebut juga cukup variatif, yakni melalui sosialisasi dalam berbagai agenda kerja, doktrin atau ajaran kebersamaan, pengarahan baik dari

pimpinan maupun senior dan juga melalui pengajaran.

Masa internalisasi yang intensif dan berkesinambungan serta melalui cara-cara yang variatif menumbuhkan pemahaman dan dorongan yang kuat pada diri polisi untuk menerapkannya guna mendukung pelaksanaan peran tugas meski implikasinya tidak hanya diterapkan pada perihal yang positif tetapi juga perihal negatif. Internalisasi nilai-nilai pendukung BWoS ini berkontribusi dalam pembentukan beberapa faktor pendukung subkultur BWoS temuan penelitian ini khususnya loyalitas terhadap sesama rekan polisi dan beberapa faktor pendukung lainnya. Adapun rincian detail faktor-faktor pendukung temuan penelitian ini baik yang bersifat eksternal maupun eksternal dapat dicermati pada Tabel 8. Ilustrasi tentang dinamika

terjadinya sikap diam atas OMB rekan polisi lain yang menjadi implikasi dari eksistensi subkultur BWoS, dapat dicermati dari peta tematik pada Gambar 1.

### **Pembahasan**

Penelitian ini mengungkap masih eksisnya subkultur BWoS yang terimplikasi dalam respon tidak melaporkan atau bersikap diam atas OMB rekan polisi lain di salah satu wilayah yang menjadi bagian dari institusi Polri. Secara umum hal ini mendukung pendapat (Wood, 1997) bahwa subkultur BWoS bersifat universal karena secara konsisten ditemukan pada institusi kepolisian di berbagai belahan dunia. Dengan demikian temuan penelitian ini mendukung temuan penelitian terdahulu yang secara konsisten telah membuktikan hal tersebut sejak tahun 1950-an hingga kini. Temuan studi Westley tahun 1950-an yang membuktikan bahwa BWoS telah eksis di *Indiana Police Department* (Prpic & Peacock, 2019). *Knapp and Mollen Commission* di New York, *Christopher Commission* di Los Angeles, *Fitzgerald Inquiry and Wood Royal Commision* di Australia selama tiga dekade terakhir juga telah menunjukkan eksistensi subkultur BWoS beserta efek korosif dan destruktif yang ditimbulkannya terutama terhadap fungsi integritas dari polisi (Kleinig, 2001). Weisburd et al. (2000) menemukan bahwa dua pertiga polisi tidak melaporkan kesalahan serius yang dilakukan polisi lain. Studi komparatif dari Klockars et al. (2004) juga menemukan perbedaan subkultur BWoS yang signifikan di

12 negara. Begitu pula studi komparatif yang lebih baru mendukung hal ini karena menemukan perbedaan BWoS di 10 negara (Armenia, Australia, Kroasia, Estonia, Rusia, Slovenia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, AS) (Ivkoviæ & Haberfeld, 2015).

Meskipun temuan penelitian mendukung temuan-temuan terdahulu tentang eksistensi subkultur BWoS di institusi kepolisian, penelitian ini menemukan keunikan respon polisi saat menyaksikan OMB polisi lain yang tidak ditemukan dalam penelitian terdahulu yakni respon tidak melaporkan untuk sementara waktu atau sikap diam temporer. Respon ini berada di area abu-abu dalam arti polisi tidak secara tegas mengambil tindakan melaporkan atau tidak melaporkan. Respon ini bersifat temporer karena berpotensi untuk berubah menjadi tindakan melaporkan jika setelah melalui investigasi ditemukan bukti yang kuat terkait OMB yang dilakukan rekan polisi ataupun jika rekan polisi pelaku OMB sudah dinasehati namun tetap melakukan OMB yang lain. Namun demikian, jika yang terjadi sebaliknya, bukti OMB rekan polisi tidak cukup kuat ataupun pelaku OMB sudah menunjukkan kecenderungan perubahan yang lebih baik, respon diam ini tetap akan terus dipertahankan. Artinya OMB yang pernah dilakukan dimaafkan. Temuan ini merefleksikan demikian kuatnya nilai-nilai subkultur BWoS terserap dalam diri polisi sehingga polisi sedemikian rupa berupaya untuk semaksimal mungkin melindungi rekan sesama polisi yang sedang

terlibat masalah. Hal ini mendukung temuan sebagian besar literatur yang menegaskan bahwa subkultur BWoS lebih mengakar kuat di iklim kerja polisi daripada sipil karena polisi bekerja dalam misi yang berbahaya hingga membutuhkan solidaritas dan perlindungan diri (Kingshott et al., 2004; Paoline, 2003; Skolnick, 2002) khususnya dari sesama polisi.

Nilai-nilai pendukung subkultur BWoS yang mengakar kuat di iklim kerja Polri yang diturunkan dari generasi ke generasi bukan tanpa sebab. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori iklim etis bahwa iklim etis yang berkembang di kepolisian yakni iklim kebersamaan dalam persahabatan atau persaudaraan menjadi pedoman yang melandasi perilaku etis ataupun tidak etis (Cullen & Bronson, 1993). Iklim persaudaraan ini berpotensi untuk dimaknai dan diterapkan tidak saja untuk hal yang positif tetapi juga perihal yang negatif. Iklim tersebut mendasari keyakinan polisi bahwa menutupi OMB polisi lain dapat dibenarkan norma etika yang berkembang di kepolisian demi menjunjung tinggi loyalitas di antara sesama polisi. Prpic dan Peacock (2019) menegaskan temuan Westley dan Bittner di tahun 1970-an yang menyebutkan bahwa subkultur BWoS disosialisasikan secara persisten dalam institusi kepolisian dengan penekanan pada sifat pekerjaan polisi yang berbahaya sehingga polisi dianjurkan untuk hanya mempercayai rekan-rekan sesama polisi dan melindungi polisi lainnya melalui subkultur BWoS. Hal ini

juga didukung oleh temuan penelitian yang menemukan sosialisasi sebagai cara yang digunakan institusi Polri untuk menginternalisasi nilai-nilai yang mendukung BWoS. Penelitian ini mengungkap cara-cara internalisasi yang lebih variatif dari temuan terdahulu, yakni: doktrin, pengarah pimpinan atau senior dan juga pengajaran. Diantara keempat cara internalisasi tersebut, sosialisasi (pada berbagai agenda kerja) merupakan cara yang paling banyak digunakan.

Cara internalisasi nilai-nilai subkultur BWoS dari institusi Polri yang memang cukup variatif memberikan penekanan pada perihal yang sama, yakni kebersamaan. Adapun kebersamaan yang dimaksud esensinya merujuk pada kekompakan yang dapat menumbuhkan loyalitas diantara sesama polisi dengan penekanan pada kesalahan satu orang menjadi kesalahan kelompok. Hal ini cenderung dimaknai polisi sebagai anjuran untuk tidak saling menjatuhkan, saling membantu dan tidak membiarkan rekan polisi terlibat dalam masalah. Salah satu bentuk penerapannya adalah pilihan tidak melaporkan atau bersikap diam atas OMB polisi lain untuk melindungi rekan sesama polisi demi mencapai tujuan yakni menjaga reputasi Polri agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini menguatkan pendapat Manning (1997) dan Kappeler et al. (1999) subkultur BWoS merupakan instrumen untuk kohesi internal yang menyediakan solidaritas dan perlindungan yang dibutuhkan polisi. Nilai-nilai pendukung

subkultur BWoS ini tertanam kuat dalam diri polisi. Selain karena diinternalisasi dengan cara-cara yang variatif, temuan penelitian juga membuktikan bahwa internalisasi dilakukan institusi Polri secara intensif dan berkesinambungan sejak dari masa pendidikan, disaat-saat pelatihan hingga masa bekerja. Hal ini menyebabkan subkultur BWoS dapat terus berkembang dari generasi ke generasi.

Integritas polisi yang terkikis oleh nilai-nilai subkultur BWoS dipengaruhi fakta-fakta terkait dampak buruk yang dialami polisi yang melaporkan OMB rekan polisi lain. Penelitian ini mengungkap bahwa masa depan karir, keselamatan diri dan sanksi sosial yang berat akan dialami polisi yang berani melaporkan OMB rekan polisi lain. Hal ini menimbulkan ketakutan bagi polisi sehingga memilih untuk bersikap diam saat mengetahui OMB rekan polisi lain. Sebagaimana yang diungkap dalam temuan penelitian bahwa alasan terbanyak yang mendasari sikap diam polisi adalah rasa takut terlibat masalah yang lebih besar. Secara spesifik dapat disimpulkan bahwa keberanian melanggar subkultur BWoS akan berbiaya mahal mengingat serentetan perihal buruk yang akan dialami. Temuan Kleinig (2001) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi BWoS menguatkan hal ini karena salah satu faktor yang menjadi temuan studinya menyebutkan bahwa biaya melanggar BWoS mahal, meliputi biaya sosial (dilecehkan atau dikucilkan), biaya karir (dimutasikan, di evaluasi secara buruk, tidak dipromosikan) dan biaya fisik atau psikologis (mengalami stres berkepanjangan).

Secara garis besar temuan penelitian mengungkap faktor-faktor pendukung subkultur BWoS yang bersifat internal lebih mempengaruhi subkultur BWoS yang berkembang di Polri. Loyalitas diantara sesama polisi menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini juga menjadi salah satu faktor temuan dari Kleinig (2001) yakni kesetiaan yang mendalam terhadap hubungan yang terjalin di antara sesama petugas polisi. Faktor lain yang menjadi temuan penelitian ini seperti penghindaran masalah, motif untuk menjaga reputasi Polri, merasa bukan tanggung jawabnya untuk mengurus perilaku buruk rekan, memiliki hutang budi dengan pelaku, dan memiliki kedekatan emosi dengan pelaku mengilustrasikan bahwa aspek-aspek yang ada dalam diri polisi lebih berpotensi menguatkan berkembangnya subkultur BWoS di Polri. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan kuatnya pengaruh internalisasi nilai-nilai pendukung subkultur BWoS yang ditanamkan institusi Polri.

## **Simpulan**

Subkultur BWoS terbukti eksis dan berkembang di salah satu bagian dari institusi Kepolisian Indonesia (Polri). Keunikan respon terhadap OMB rekan polisi yang berupa sikap diam untuk sementara waktu mengindikasikan kuatnya pengaruh internalisasi nilai-nilai BWoS yang ditanamkan institusi Polri dapat diasumsikan sebagai upaya mentoleransi ataupun mengampuni OMB yang dilakukan

polisi. Bentuk pemolisian demokratis yang masih relatif baru diadopsi Polri, yang diawal sempat diasumsikan peneliti mempengaruhi eksistensi subkultur BWoS di Indonesia belum dapat disimpulkan dari temuan penelitian ini.

Serangkaian temuan-temuan lain dalam penelitian ini yang membuktikan eksistensi subkultur BWOS seperti: Alasan bersikap diam dan konsekuensi negatif dari melaporkan OMB rekan polisi; waktu dan cara internalisasi nilai-nilai pendukung subkultur BWOS serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diintegrasikan menjadi peta tematik dinamika eksistensi subkultur BWOS dapat memberi gambaran proses berkembangnya subkultur tersebut di salah satu wilayah Polda di Indonesia.

### **Saran**

Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk meluaskan area penelitian di wilayah-wilayah lain dari institusi Polri di Indonesia untuk melihat persamaan dan perbedaan pola-pola dari dinamika eksistensi subkultur BWoS sehingga diperoleh gambaran yang lebih representatif dari praktek pemolisian di Indonesia. Saran lain yang peneliti usulkan adalah menggunakan metode pengambilan data yang memungkinkan perolehan data yang lebih luas dan mendalam yakni dengan metode wawancara *Leaderless Group Discussion* (LGD) yang dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk dilakukan peneliti (efek pandemi COVID-19). Saran terakhir, dianjurkan bagi peneliti lain

untuk lebih mengungkap perihal yang belum dapat disimpulkan dari temuan penelitian ini yakni dampak pengadopsian model pemolisian demokratis oleh Polri terhadap eksistensi subkultur BWoS

### **Ucapan terima kasih**

Penelitian ini dapat terlaksana atas dukungan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Untuk itu tim peneliti mengucapkan terima kasih atas pendanaan dan fasilitas yang diberikan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. Tim peneliti juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Bagus Riyono, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, yang telah memberikan usulan ide terkait tema penelitian ini sehingga tim peneliti terinspirasi untuk menindaklanjuti. Dan yang tidak dapat diabaikan adalah ucapan terima kasih atas ijin dan kesempatan yang telah diberikan oleh salah satu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang terdapat di Pulau Jawa terkait kesediaan menjadikan wilayah tugasnya sebagai tempat penelitian, beserta staf-staf polisi yang telah membantu proses pengambilan data.

### **Referensi**

- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss* (Vol. 1 Attachment). Basic Books.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

- Crank, J. P. (1998). Understanding police culture. In *Anderson Publishing*.
- Cullen, J. B., Victor, B., & Bronson, J. W. (1993). The ethical climate questionnaire: An assessment of its development and validity. *Psychological Reports*, 73(2), 667–674. <https://doi.org/10.2466/pr0.1993.73.2.667>
- Endro, G. (2017). Menyelisik makna integritas dan pertentangannya dengan korupsi. *Integritas*, 3(1), 131–152. <https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/Jurnal-INTEGRITAS-Volume-3-No-1-tahun-2017/Jurnal-INTEGRITAS-Volume-3-No-1-tahun-2017-06.pdf>
- Feeney, J. A. (1999). Adult romantic attachment and couple relationships. In *Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications*. (pp. 355–377). The Guilford Press.
- Greene, J. R., Piquero, A. R., Hickman, M. J., & Lawton, B. A. (2004). *Police integrity and accountability in Philadelphia: Predicting and assessing police misconduct*. [distributor]. <https://doi.org/10.3886/ICPSR03977.v1>
- Hiariej, E. O. (2017). *Tembok biru yang diam*. Beniharmoniharefa.Blogspot.Com. <https://beniharmoniharefa.blogspot.com/2017/05/tembok-biru-yang-diam.html>
- Hill, J., Fonagy, P., Safier, E., & Sargent, J. (2003). The ecology of attachment in the family. *Family Process*, 42(2), 205–221. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2003.42202.x>
- Hinde, R. (1979). *Towards understanding relationship*. Academic Press.
- Ivkoviæ, S. K., & Haberfeld, M. R. (Eds.) (2015). *Measuring police integrity across the world: Studies from established democracies and countries in transition*. Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2279-6>
- Kappeler, V. E. (1999). *The police and society*. Prospect Heights III: Waveland Press.
- Kingshott, B. F., Bailey, K., & Wolfe, S. E. (2004). Police culture, ethics and entitlement theory. *Criminal Justice Studies*, 17(2), 187–202. <https://doi.org/10.1080/0888431042000235020>
- Kleinig, J. (2001). The Blue Wall of Silence: An ethical analysis. *International Journal of Applied Philosophy*, 15(1), 1-23. <https://doi.org/10.5840/ijap20011515>
- Klockars, C. B., Ivkoviæ, S. K., & Haberfeld, M. R. (2006). *Enhancing police integrity*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-36956-3>
- Klockars, C. B., & Ivkoviæ, S. K. (2004). Measuring police integrity. In *Police Integrity and Ethics*. Wadsworth.
- Klockars, C. B., Ivkoviæ, S. K., & Haberfeld, M. R. (2004). The contours of police integrity. In C.B. Klockars, S.K. Ivkoviæ, & M.R. Haberfeld (Eds.) *The contours of police integrity* (p. 1-18). Sage Publication, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452229690>
- Klockars, C. B., Ivkoviæ, S. K., & Haberfeld, M. R. (2007). Enhancing police integrity. In C.B. Klockars, S.K. Ivkoviæ, & M.R. Haberfeld (Eds.), *Enhancing Police Integrity* (p. 271-276). <https://doi.org/10.1007/978-0-387-36956-3>
- Kobak, R. (1999). The emotional dynamics of disruptions in attachment relationships: Implications for theory, research, and clinical intervention. In *In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachments. Theory, research, and clinical applications* (p. 21"43). Guilford Press.
- KontraS. (2019). *Netralitas, diskresi, dan kultur kekerasan masih menjadi tantangan Polri*.
- Kutnjak Ivkoviæ, S., Morgan, S. J., Cajner Mraoviæ, I., & Borovec, K. (2020). Does the police code of silence vary with police assignment? An empirical exploration of the relation between the code and assignment. *Police Practice and*

- Research*, 21(2), 101–116. <https://doi.org/10.1080/15614263.2018.1537848>
- Kutnjak Ivkoviæ, S., & O'Connor Shelley, T. (2008). The police code of silence and different paths towards democratic policing. *Policing and Society*, 18(4), 445–473. <https://doi.org/10.1080/10439460802457677>
- Long, M. A., Cross, J. E., Shelley, T. O. C., & Kutnjak Ivkoviæ, S. (2013). The normative order of reporting police misconduct: Examining the roles of offense seriousness, legitimacy, and fairness. *Social Psychology Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/0190272513493094>
- Manning, P. (1997). *Police work: The social organization of policing*. Prospect Heights, IL.
- Marshall, S. (2019). *Whistleblowing and moral dilemmas in policing: An analysis of police culture and the "Blue Code of Silence"* [Brock University]. <http://hdl.handle.net/10464/14276>
- Meyer, M. E., Steyn, J., & Gopal, N. (2013). Exploring the public parameter of police integrity. *Policing: An international Journal of Police Strategies & Management*, 36(1), 140–156. <https://doi.org/10.1108/13639511311302515>
- Muttaqin, L., & Susanto, M. E. (2018). Mengkaji serangan balik koruptor terhadap KPK dan strategi menghadapinya. *Integritas*, 4(1), 101–144. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.146>
- Oktaryal, A., Oemar, E., Yudha, M., Sofi, S., & Djafar, W. (2018). *Indeks negara hukum Indonesia tahun 2017*. Indonesian Legal Roundtable.
- Paoline, E. A. (2003). Taking stock: Toward a richer understanding of police culture. *Journal of Criminal Justice*, 31(3), 199–214. [https://doi.org/10.1016/S0047-2352\(03\)00002-3](https://doi.org/10.1016/S0047-2352(03)00002-3)
- Prpic, M., & Peacock, R. (2019). *The police code of silence in a comparative perspective* (preprint). <https://www.researchgate.net/publication/328609616-The-Police-Code-of-Silence-In-A-Comparative-Perspective>
- Putra, I. P. (2019). *Amnesty sayangkan perilaku buruk oknum polisi pada aksi 22 Mei*. Medcom.Id.
- Skolnick, J. (2002). Corruption and the blue code of silence. *Police Practice and Research*, 3(1), 7–19. <https://doi.org/10.1080/15614260290011309>
- Skolnick, J. H. (2000). Code blue. *American Prospect*. <https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000463651.10166.db>
- Sudarto, E. (2015). "Code of silence" pada tipologi korupsi polisi. <https://www.binmasnokenpolri.com/2015/08/24/code-of-silence-pada-tipologi-korupsi-polisi/>
- Taher, A. P. (2019). *Saat BPS dan KPK kesulitan mengukur indeks integritas polisi*. Tirto.Id.
- Vitale, A. S. (2017). *The end of policing*. Verso Books.
- Weisburd, D., Greenspan, R., Hamilton, E. E., Williams, H., & Bryant, K. A. (2000). Police attitudes toward abuse of authority: Findings from a national study. *National Institute of Justice Research in Brief*, (May 2000), 1–14. <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/181312.pdf>
- Wood, J. R. T. (1997). *Royal Commission into the New South Wales Police Service - Final Report* (Vol. I, Issue May). <https://www.australianpolice.com.au/wp-content/uploads/2017/05/RCPS-Report-Volume-1.pdf>



Received 22 February 2021  
Revised 29 December 2021  
Accepted 13 January 2022